

Halaman persetujuan	ii
Halaman pengesahan	iii
Surat pernyataan	iv
Halaman persembahan	vi
Kata pengantar	vii
Daftar isi	xii
Abstraksi	xv

BAB I

DESENTRALISASI MENJADI PENYEBAB KONFLIK PUSAT - DAERAH

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Konseptual	6
D.1 Hubungan Pusat dan Daerah (Desentralisasi)	7
D.2 Konflik Dalam Hubungan Pusat - Daerah	17
D.2.1 Apa itu Konflik?	17
D.2.2 Konflik Vertikal Dan Konflik Horizontal	19
D.2.3 Penyebab Dan Sumber Konflik	20
E. Definisi Konseptual	23
F. Definisi Operasional	24
G. Metode Penelitian	25
G.1 Jenis Penelitian	25
G.2. Unit Analisis Data	26
G.3. Jenis Sumber Data	26

U. Perencanaan Data	28
H. Sistematika Bab	28

BAB II

PERKEMBANGAN HUBUNGAN PUSAT - DAERAH DAN

KARAKTERISTIK KOTA SURAKARTA

A. Pengantar.....	30
B. Hubungan Pusat - Daerah Di Indonesia Dan Surakarta.....	31
B.1 Sejarah Desentralisasi Dan Hubungan Pemerintah Pusat - Daerah Dari Masa Ke Masa.....	31
B.2. Hubungan Pemerintah - Pemkot Surakarta Tahun 2008-2009.....	42
C. Karakteristik Kota Surakarta.....	45
C.1. Potret Sosial Masyarakat Surakarta.....	46
C.2. Potret Ekonomi Masyarakat Surakarta.....	48
C.3. Potret Politik Kota Surakarta	51
D. Penutup	53

BAB III

BERBAGAI “BANTUAN” PENANGGULANGAN KEMISKINAN

KOTA SURAKARTA

A. Pengantar.....	54
B. Kemunculan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP)	55
B.1. Sejarah PNPM Mandiri Perkotaan (Nasional)	55
B.2. PNPM MP sebagai “bantuan” untuk Masyarakat	60

B.3. Dinamika Konflik PMMP di Kota Surakarta	62
C. Penolakan PNPM MP Oleh Pemerintah Kota Surakarta	65
C.1. Alasan Penolakan Pnpm Mandiri	65
C.2. Respon Pemerintah Pusat Atas Penolakan Pemerintah Surakarta	76
C.3. Respon Masyarakat Solo (Surakarta)	78
D. Penutup	81

BAB IV

KONFLIK PEMERINTAH DENGAN PEMKOT SURAKARTA

DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PROGRAM PNPM - MP

A. Pengantar	82
B. Dinamika Konflik Dalam Lembaga Pemerintahan (Pusat - Daerah)	83
B. 1. Pemantik Pembangunan Daerah (Kemiskinan)	83
B. 2. Sumber Konflik	85
B. 3. Adu Strategi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kota	90
C. Catatan Kritis Pelaksanaan Desentralisasi (otonomi daerah) dan Hubungan Pemerintah Pusat - Pemerintah Kota Surakarta	95
C.1. Desentralisasi: Keinginan Tak Terbandung	95
C.2. Desentralisasi Yang Terbatas	97
D. Penutup	102

BAB V

Kesimpulan	103
------------------	-----